

KIC
Pd 23/01
Ast
2

SKRIPSI

Rini Puji Astutik

TINJAUAN YURIDIS KEKUASAAN ORANG TUA DAN PERWALIAN TERHADAP ANAK



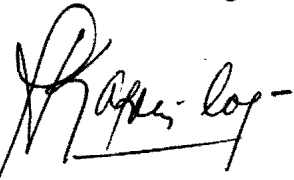
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**TINJAUAN YURIDIS KEKUASAAN ORANG TUA DAN PERWALIAN
TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pembimbing,



Liliek Kamilah, S.H., M. Hum.
NIP. 130 531 799

Penyusun,



Rini Puji Astutik
NIM. 039714542

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Menurut hukum perdata bahwa kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak merupakan suatu tanggung jawab ayah dan ibu pada pribadi anak dan hartanya selama keduanya tidak dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan itu. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua harus mewakili anak dalam segala tindakan perdata sedangkan dalam perwalian yang bertanggungjawab mengurus pribadi anak dan hartanya adalah walinya.
2. Menurut hukum Islam bahwa kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilakukan kedua orang tua pada pemeliharaan anak (*hadhanah*), meliputi jasmani dan rohaninya sampai ia menjadi dewasa. Kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak tetap ada, walaupun keduanya telah bercerai. Disamping harus memelihara anak, orang tua juga harus mengurus harta kekayaan anak sampai ia dewasa.
3. Persamaan kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak menurut hukum perdata dan hukum Islam mengakui bahwa kekuasaan dan perwalian itu hilang ketika anak itu sudah dewasa.
4. Perbedaananya kalau menurut hukum perdata kekuasaan orang tua terhadap anak sebelum dewasa itu ditentukan oleh ayah, ibu akan melaksanakan jika ayah

...dunia maka dengan sendirinya menjadi wali anak tersebut, sedangkan menurut hukum Islam kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak yang belum dewasa (*mumayyiz*) diserahkan sepenuhnya kepada ibu apabila terjadi perceraian.

5. Relevansi yang terjadi antara kekuasaan orang tua dan perwalian sangat erat, baik kekuasaan orang tua maupun perwalian merupakan lembaga perlindungan kepentingan anak yang dilegitimasi oleh hukum.

Saran

Dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 107 ayat (4) disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Kompilasi hukum Islam tidak menyebutkan syarat “beragama Islam” bagi seorang wali, padahal syarat tersebut seharusnya dicantumkan dalam kompilasi hukum Islam karena syarat ini penting demi kemaslahatan anak yang berada dibawah perwalian tersebut. Apabila seorang wali beragama selain Islam maka wali tersebut seharusnya tidak boleh menjadi wali kecuali muslim juga, kalau anak ditetapkan berada ditangan wali yang tidak seagama dengan anak, maka dikhawatirkan akan terpengaruh dengan agama walinya sehingga tujuan perwalian yang ditekankan demi kemaslahatan anak tidak tercapai.